

## PENGARUH STRUKTUR DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE PADA TINGKAT KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE KONVERGENSI IFRS

Septi Ari Widjayanti  
*septriari0917@yahoo.com*  
Wahidawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to test and to analyze whether the mechanism and the structure of corporate governance has an influence to the level of compliance of IFRS convergence mandatory disclosure on manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2011 to 2013 periods. The samples are 84 manufacturing companies and the characteristic of sample selection has been done by using purposive sampling method. The data analysis has been carried out by using multiple linear regressions analysis. The result of the research describes that the proportion of female commissioner, managerial ownership, institutional ownership, the number of the meeting of audit committee, and the proportion of independent commissioner have influence to the level of compliance of the IFRS convergence mandatory disclosure whereas the education background of the Main Commissioner, the number of the audit committee and the number of meeting of the board of commissioner does not have any significant influence to the level of compliance of the IFRS convergence mandatory disclosure.*

**Keywords:** *The Structure of Corporate Governance, the Mechanism of Corporate Governance, the Level of Compliance of the IFRS convergence mandatory disclosure.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa apakah struktur dan mekanisme *corporate governance* berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011 hingga 2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 84 perusahaan manufaktur dengan karakteristik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah komite audit dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

**Kata kunci:** *Struktur corporate governance, mekanisme corporate governance, tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS*

### PENDAHULUAN

Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber ekonomi menjadi barang dan jasa agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan arus informasi yang pesat menuntut perusahaan untuk dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna informasi, seperti *shareholder* dan *stakeholder*. Hal itu menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin ketat dan kompetitif. Tujuan perusahaan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat melainkan juga mampu bersaing dengan perusahaan

lain agar keberlangsungan perusahaan tetap berjalan dan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna.

Persaingan perusahaan yang semakin ketat dan kompetitif harus diikuti dengan penyajian informasi yang berupa laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan bisnis dalam skala nasional maupun internasional, Ikatan Akuntan Indonesia telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi *Internasional Financial Reporting Standards* (IFRS) yang dikeluarkan oleh *Internasional Accounting Standards Board* (IASB) dan telah diberlakukan secara penuh di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2012. Penerapan standar akuntansi yang sama diseluruh dunia juga akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding dalam pelaporan keuangan. Adanya kebijakan ini pihak yang paling beruntung adalah investor dan kreditor trans-nasional serta badan-badan internasional. Dengan adopsi IFRS ini banyak perusahaan yang mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal. Adapun manfaat yang diperoleh dari suatu standar global, yaitu : (1) Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. (2) Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. (3) Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi. (4) Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi (Immanuela 2009). (5) Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.

Transparansi sendiri merupakan suatu bagian dari implementasi *good corporate governance* (Wardhani, 2008). Dengan adanya pengungkapan dan transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survei yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* pada investor internasional di Asia, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada salah satu yang terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi (Utami *et al.*, 2012).

Dengan adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan wajib masih kurang penerapannya, terutama pada laporan laba rugi, misalnya pada kasus *mark-up* laporan keuangan PT. Kimia Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya sebesar Rp 99 miliar dicatat sebesar Rp 132 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan sebesar Rp 33 miliar (Syahrul, 2002).

Manipulasi laporan keuangan PT. Kimia Farma, Tbk terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. *Corporate Governance* mensyaratkan adanya struktur dan mekanisme perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Dari kejadian tersebut, maka peneliti ingin meneliti kembali atas apa yang dilakukan Utami pada tahun 2012 dengan memberikan tambahan variabel serta menggunakan periode tahun yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur dan mekanisme *corporate governance* pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

## TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### *Agency Theory*

Hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance* dan pengungkapan wajib. Di dalam suatu perusahaan sering kali mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain, dalam hal ini perusahaan atas nama *principal* dan pihak lain sebagai *agent*. Manajemen, sebagai *agent* atau pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan dana dari pemilik atau *principal*, harus mempertanggungjawabkan semua keputusan yang diambilnya kepada *principal*.

Antara *principal* dan manajer mempunyai tujuan yang berbeda, *principal* lebih mementingkan keuntungan pribadi sedangkan manajer lebih mementingkan kesejahteraannya sendiri. Perbedaan persepsi antara *principal* dan *agent* (manajer) inilah akan menimbulkan *asymetry informasi*. Manajer yang lebih cenderung mengetahui keadaan perusahaan mempunyai peluang besar untuk melakukan tindakan yang tidak menguntungkan pemilik dalam pelaporan keuangannya. Oleh karena itu perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* sebagai bentuk pengawasan laporan keuangan. GCG sangat berperan penting untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan.

Pengawasan yang dimaksudkan adalah pengawasan dalam hal tata kelola keuangan, penerapan dan aturan manajemen sehingga tercipta suatu korelasi yang efisien untuk pelaporan keuangan, bentuk pengawasan meliputi struktur dan mekanisme dalam GCG.

Laporan keuangan yang dilaporkan kepada *principal* haruslah mencerminkan nilai-nilai akuntansi yang sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan melakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan, yaitu dengan konvergensi IFRS. Pengungkapan atas konvergensi IFRS ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi yang dapat dipahami dan diperbandingkan (Choi *et al.*, 1999).

Verrecchia dan Diamond (1991) menyatakan bahwa pengungkapan informasi publik dapat mengurangi asimetri informasi sebagaimana untuk menarik investor agar dapat meningkatkan likuiditas pasar modal dan mengurangi biaya modal perusahaan. Dengan adanya pengungkapan yang sangat luas oleh manajemen akan dapat mengurangi konflik yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Maka dari itu pihak manajemen harus dapat memberikan perlindungan kepada pihak investor publik berupa pemberian informasi dan pengungkapan yang relevan mengenai perusahaan dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah seperti pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang sesuai dengan peraturan BAPEPAM.

### **Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS**

Pengungkapan merupakan sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan informasi kepada investor. Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009) terdapat dua sifat pengungkapan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion, 2008).

Popova *et al.* (2013) menyatakan bahwa pengungkapan wajib sebagai sarana informasi yang diharuskan oleh badan regulasi untuk disampaikan oleh perusahaan. *Mandatory disclosure* merupakan keseluruhan aspek dan informasi yang harus dipublikasikan oleh perusahaan sebagai akibat dari diberlakukannya peraturan hukum serta peraturan pasar modal maupun standar akuntansi (Adina dan Ion, 2008).

Konvergensi dalam standar akuntansi keuangan merupakan suatu proses untuk menyesuaikan standar akuntansi yang digunakan di negara lain dengan kondisi yang ada didalam negeri. Dalam hal ini, konvergensi IFRS adalah suatu proses untuk menyesuaikan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS. Penyesuaian tersebut telah diputuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk diterapkannya IFRS di Indonesia secara penuh sejak tanggal 1 Januari 2012.

### ***Good Corporate Governance***

Menurut FCGI (2001) *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam mencapai GCG diperlukan suatu komponen-komponen yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* dengan benar seperti adanya struktur dan mekanisme *corporate governance*.

Di Indonesia struktur *corporate governance* terdiri dari pemegang saham, komisaris, direksi, komite audit, sekertaris perusahaan, manajer dan karyawan, auditor eksternal, auditor internal, dan *stakeholder* lainnya. Dari penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur *corporate governance* merupakan susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan. Sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan komisaris utama dan proporsi komisaris wanita.

Efektivitas *corporate governance* ditentukan oleh bagaimana mekanisme *corporate governance* tersebut bekerja dalam perusahaan (Ashurov, 2010). Sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* tetapi jika mekanisme tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai (Herwidayatmo, 2000 dalam Utami *et al.*, 2012).

Menurut Lins dan Warnock (2004) mekanisme dibagi menjadi dua yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Dari kedua mekanisme tersebut, mekanisme internal *corporate governance* merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal. Internal mekanisme sendiri diprosikan dengan jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris, serta kepemilikan manajerial. Sedangkan eksternal mekanisme merupakan cara mempengaruhi perusahaan selain dengan internal mekanisme, yang diprosikan dengan kepemilikan institusional.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Latar belakang pendidikan anggota dewan berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki, akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi karena dengan memiliki pengetahuan dibidang bisnis dan ekonomi, anggota dewan memiliki kemampuan lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis dari pada tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi (Kusumastuti *et al.*, 2007)

Teori tersebut ditunjang dengan penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) yang menemukan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFRS. Hal ini diungkapkan juga oleh Kusumastuti *et*

al. (2007) yang menemukan dimana terdapat kemungkinan bahwa yang dapat menunjang kelangsungan bisnis adalah latar belakang pendidikan komisaris utama yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H<sub>1</sub>: Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Wanita pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Proporsi dewan komisaris wanita dalam suatu perusahaan hanyalah sebagian kecil dari jumlah total seluruh komisaris, namun komisaris wanita dinilai lebih teliti dan lebih cekatan dibandingkan dengan komisaris pria.

Kusumastuti *et al.* (2007) menjelaskan jika wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari resiko, dan lebih teliti dibanding pria, dari sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Wanita juga dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah dalam jajaran direksi.

Dalam hal ini wanita juga mempunyai peranan untuk memeriksa dan memonitoring laporan keuangan perusahaan, tak terkecuali tentang pengungkapan wajib untuk konvergensi IFRS.

Dari pemaparan diatas, diharapkan komisaris wanita mampu mengontrol pengungkapan wajib atas konvergensi IFRS yang dibuat oleh manajemen. Sehingga laporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H<sub>2</sub>: Proporsi dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Menurut Herawaty (2008) bahwa kepentingan antar *agent* dan *principal* dapat disatukan dengan memperbesar kepemilikan saham manajer, sehingga akan menyamakan kepentingan manajer dan pemilik, yaitu memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Dengan itu manajer yang memiliki saham perusahaan mempunyai insentif lebih besar untuk memaksimalkan kinerjanya, diantaranya kepatuhan terhadap pengungkapan wajib yang disyaratkan (Al-Fayoumi *et al.*, 2010).

Clemente dan Labat (2005) di Spanyol, Nasir dan Abdullah (2004) di Malaysia dalam Utami *et al.* (2012) di Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan sukarela.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis :

H<sub>3</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Cornet *et al.* (2006) dalam Tanyawati (2012) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005).

Rouf dan Al-Harum (2011) dalam Barako (2007) menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan institusional yang besar akan membuat tingkat pengungkapan wajib juga semakin banyak karena kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005).

Dari pernyataan diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **Pengaruh Jumlah Komite Audit pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Pada perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit dipandang sebagai suatu komite dalam perusahaan yang bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan yang mungkin akan merugikan *stakeholders*. Al Akra *et al.* (2010) menyatakan bahwa proporsi komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini karena jika semakin besar jumlah anggota komite audit maka akan dapat secara efektif mengontrol tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Berikut ini adalah perkembangan hipotesis yang di dapat dari uraian diatas tersebut :

H<sub>5</sub>: Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Jumlah rapat dewan komisaris menjadi salah satu pertimbangan dalam mekanisme *corporate governance*. Hal ini dikarenakan ketika semakin sering dewan komisaris melakukan pertemuan atau rapat, maka diharapkan banyak menghasilkan keputusan manajemen yang transparan. Sehingga adanya penerapan dalam tingkat kepatuhan pengungkapan wajib juga termonitoring dengan baik.

Ettredge *et al.* (2010) dalam Allegrini dan Greco (2011) menyatakan bahwa frekuensi rapat audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Semakin sering diadakan rapat komite audit diharapkan meningkatkan pengungkapan wajib IFRS.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis :

H<sub>6</sub>: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **Pengaruh Proporsi Komisaris Independen pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan di dalam perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Ayuso dan Argondana (2007) menemukan bahwa *independent director* lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dari pada *non independent director* karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi.

Komisaris Independen merupakan wakil dari pemegang saham minoritas (Ettredge *et al* 2010). Cebrioni dan Parbonetti (2007), Patelli dan Prencipe(2007), Hossain (2008) dan Prawinandi *et al.* (2012), serta Kelton dan Yang (2008) menemukan hubungan positif yang signifikan antara Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin *et al.* (2009) menemukan bahwa proporsi

komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Semakin besar proporsi komisaris independen pengungkapan wajib IFRS semakin tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis :

H<sub>7</sub>: Proporsi independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

### **Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Peran dewan komisaris berfungsi memonitoring keputusan manajemen. Intensitas kuantiti rapat yang dihadiri para dewan komisaris diharapkan memberikan keputusan yang transparan untuk pengungkapan wajib IFRS. Ini dibuktikan dengan penelitian Ettredge *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis :

H<sub>8</sub>: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan terkait dengan topik dalam penelitian ini adalah metode penelitian kasual komparatif yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 84 perusahaan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013 (2) Perusahaan manufaktur yang tidak berturut-turut *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013 (3) Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangannya dengan menggunakan mata uang rupiah.

Data mengenai struktur dan mekanisme *corporate governance* diperoleh dari laporan tahunan, publikasi dari Galeri Investasi Pojok Bursa Efek STIESIA dan website resmi Bursa Efek Indonesia. Sedangkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang diprosikan oleh IAS diidentifikasi berdasarkan *IFRS Presentation and Disclosure Checklist* dari Deloitte.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang diprosikan oleh IAS. Item IAS tersebut diidentifikasi berdasarkan *IFRS Presentation and Disclosure Checklist* dari Deloitte. *Checklist* tersebut telah digunakan pada penelitian terdahulu, misalnya Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010) yang menggunakan *checklist* dari Deloitte untuk dikembangkan dan diterapkan dalam mengukur tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Item-item yang dipilih dari *checklist* ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia yang wajib diterapkan untuk periode tahun 2011 hingga 2013. Dengan rincian item pengungkapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rincian Item Pengungkapan dan IFRS yang sudah di Konvergensi**  
**kedalam PSAK untuk Periode 2011 hingga 2013**

No	PSAK	Ref.	Issued	Effective Date	Checklist	Jumlah Item	
1	PSAK 13	Porperti investasi	IAS 40	2011	01-01-12	2012	66 Item
2	PSAK 16	Aset tetap	IAS 16	2011	01-01-12	2012	69 Item
3	PSAK 30	Sewa	IAS 17	2011	01-01-12	2012	38 Item
4	PSAK 14	Persediaan	IAS 2	2008	01-01-09	2009	4 Item
5	PSAK 26	Biaya pinjaman	IAS 23	2011	01-01-12	2012	22 Item
Total						199 Item	

Sumber : [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id) dan Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist.

Desain variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan metode Dichotomous atau bisa disebut Unweighted yang juga digunakan oleh penelitian terdahulu, antara lain (Tsalavoutas *et al.*, 2008; Dahawy, 2009; Al- Mutawaa dan Hewaidy, 2010; Utami, 2012). Pengukuran tingkat kepatuhan dengan cara memberi skor 1 untuk item yang diungkapkan, skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan, dan *NA (Not Applicable)* pada item yang tidak dapat diterapkan pada perusahaan tersebut (Al-Mutawaa dan Hewaidy, 2010). Berikut persamaan untuk menghitung kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS :

$$MANDCLOS_{BY} = \frac{\sum CLOS_{BY}}{\sum MAX_{BY}}$$

Dimana :  $MANDCLOS_{BY}$  = Skor pengungkapan wajib perusahaan manufaktur pada tahun Y  
 $CLOS_{BY}$  = Jumlah item pengungkapan perusahaan manufaktur B pada Tahun  
 $MAX_{BY}$  = Nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan Manufaktur B pada tahun Y

### Variabel Independen

- a. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama  
Latar belakang pendidikan komisaris utama adalah latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis yang dimiliki oleh komisaris utama (Suhardjono dan Afni, 2009). Suhardjanto dan Miranti (2009) menjelaskan bahwa untuk mengukur latar belakang pendidikan ini diukur dengan variabel *dummy*, dimana jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau bisnis diberi kode 1, selain ekonomi dan bisnis diberi kode 0.
- b. Proporsi Dewan Komisaris Wanita  
Proporsi dewan komisaris wanita adalah perbandingan jumlah anggota komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Nalikka, 2009). Feijoo *et al.* (2012) menyatakan bahwa pengukuran yang digunakan dalam pengukuran proporsi komisaris wanita adalah dengan membandingkan jumlah komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

$$PDKW = \frac{\text{Jumlah komisaris wanita}}{\text{Total anggota dewan komisaris perusahaan}}$$



c. Kepemilikan Manajerial

Menurut El-Gazzar *et al.* (2006), kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah presentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Huafang dan Jianguo, 2007).

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Siddaharta, 2005). Indikator yang digunakan adalah presentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh saham yang beredar.

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

e. Jumlah Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk dewan komisaris berfungsi melaksanakan audit internal maupun eksternal sesuai standart yang berlaku (Bapepam LK NO. I.X.I.5). Indikator jumlah komite audit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah seluruh anggota komite audit perusahaan.

f. Jumlah Rapat Komite Audit

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2001). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan (Allegrini dan Greco, 2011), yaitu jumlah rapat audit yang dilakukan dalam satu tahun.

g. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang mempunyai posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar dapat tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi komisaris independen ini adalah presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris.

$$PKI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris yang dimiliki perusahaan}} \times 100\%$$

h. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota dewan komisaris dalam mengawasi proses *corporate governance* untuk memastikan bahwa manajemen membudayakan *corporate governance*. Jumlah rapat dewan komisaris ini diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris baik dalam lingkup internal maupun pihak diluar keanggotaan dewan komisaris.

### Variabel Kontrol

a. Likuiditas

Likuiditas merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancarnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dengan Almilia dan Retrinasari (2007) yaitu dengan membagi aktiva

lancar dengan hutang lancarnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung likuiditasnya adalah :

$$CR = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

b. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu (Nurkhin, 2009). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan membandingkan pendapatan setelah pajak dengan total ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Equity}}$$

c. Leverage

*Leverage* merupakan pengukuran besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Suhardjanto dan Miranti (2009), yaitu menggunakan rasio utang terhadap modal sendiri.

$$DTE = \frac{\text{Hutang lancar}}{\text{Total Equity}}$$

### Pengujian Hipotesis

Pengujian (uji) hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$IFRS = \beta_0 + \beta_1LBP KU + \beta_2PDKW + \beta_3KM + \beta_4KI + \beta_5JKA + \beta_6JRKA + \beta_7PKI + \beta_8JRDK + \beta_9CR + \beta_{10}ROE + \beta_{11}DTE + e$$

Keterangan :

IFRS	: <i>Madatory disclosure</i> konvergensi IFRS
LBP KU	: Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama
PDKW	: Proporsi Dewan Komisaris Wanita
KM	: Kepemilikan Manajerial
KI	: Kepemilikan Institusional
JKA	: Jumlah Komite Audit
JRKA	: Jumlah Rapat Komite Audit
PKI	: Proporsi Komisaris independen
JRDK	: Jumlah Rapat Dewan Komisaris
CR	: Likuiditas
ROE	: Profitabilitas
DTE	: <i>Leverage</i>
e	: <i>Error Terms</i>

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan metode statistik dengan interval kepercayaan 95% atau taraf signifikansi (derajat kesalahan) sebesar 5% ( $\alpha$ /probabilitas = 0,05). Berkaitan dengan hal itu ada dua alat analisis yang dipergunakan sebagai berikut :

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik deskriptif

Tabel 2 menggambarkan tentang deskripsi dari masing-masing variabel dependen variabel independen serta variabel kontrol. Berikut adalah hasil analisis deskriptif pada tiap variabel penelitian :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Independen**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
LBPKU	252	0,000	1,000	0,385	0,488
PDKW	252	0,000	80,000	8,776	16,140
KM	252	0,000	25,620	2,081	4,987
KI	252	25,000	99,000	71,318	17,341
JKA	252	1,000	7,000	3,123	0,502
JRKA	252	0,000	38,000	5,448	5,565
PKI	252	20,000	100,000	40,004	11,503
JRDK	252	0,000	43,000	5,282	6,894
CR	252	0,213	57,733	2,528	4,167
ROE	252	-7,685	3,246	0,104	0,657
LEV	252	-28,538	35,822	0,759	3,734
Valid N (listwise)	252				

Sumber: Data primer, diolah 2014

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Hasil pengujian (uji) normalitas menggunakan *kolmogorov smirnov* menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,477, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai normalitas data dengan Kolmogorov-smirnov test  $0,477 > 0,05$ , sehingga normalitas data terpenuhi.

#### b. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian pada penelitian diketahui bahwa tidak terdapat nilai *Tolerance* yang kurang dari 0,1, tidak pula ditemukan VIF yang lebih dari 10. Sehingga disimpulkan bahwa pada model analisis regresi yang akan dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan kontrol terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan manufaktur yang menjadi sampel periode tahun 2011 hingga 2013 tidak terjadi kasus multikolinearitas dan asumsi non-multikolinearitas terpenuhi.

#### c. Uji Autokorelasi

Hasil pengujian menunjukkan nilai dari *Durbin-Watson* model regresi adalah sebesar 1,882, sampel data penelitian atau  $N=252$ , variabel independen sebanyak 8 dan variabel kontrol sebanyak 3 variabel.

Pada tabel diatas telah ditemukan nilai DL (*Lower Bound, L*) adalah 1,710 dan untuk nilai DU (*Upper Bound, U*) adalah sebesar 1,876 maka dapat disimpulkan bahwa *Durbin-Watson Statistic* model regresi sudah berada dalam selang nilai kritis  $1,702 \leq 1,882 \leq 1,876$  sehingga disimpulkan bahwa asumsi non-autokorelasi dalam model regresi yang akan dipergunakan telah terpenuhi.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola *grafik scatterplot*. Hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa plot sudah menyebar secara tidak beraturan yang menunjukkan bahwa asumsi non heteroskedastisitas model regresi juga sudah terpenuhi. Dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa uji asumsi non heteroskedastisitas model regresi sudah dapat terpenuhi.

#### Analisi Korelasi dan Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antar variabel bebas, sedangkan nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variabel-variabel terikat.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Korelasi (R) dan Koefisien**  
**Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,397 <sup>a</sup>	0,158	0,119

a. Predictors: (Constant), LEV, JRKA, PDKW, CR, KI, LBP KU, PKI, JRDK, KM, JKA, ROE

b. Dependent Variable: MANDCLOS

Dilihat dari tabel 3 diatas, Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,397 menunjukkan bahwa hubungan variabel tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS terhadap variabel terikat tidak cukup kuat dan searah atau dengan kata lain jika nilai variabel bebas naik maka nilai variabel terikat juga naik.

Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,158 yang berarti bahwa sebesar 15,8% variabel tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dapat dijelaskan dengan struktur dan mekanisme *corporate governance* dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

#### Uji Hipotesis

##### Uji t

Hasil uji t model regresi dengan variabel variabel bebas latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi dewan komisaris wanita, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan variabel kontrol profitabilitas, likuiditas, dan *lverage* dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Hasi Uji T**

Variabel	t	Sig. t	Keterangan
Konstanta			
LBPKU	-,336	,737	Tidak Signifikan
PDKW	-2,719	,007	Signifikan
KM	3,138	,002	Signifikan
KI	2,604	,010	Signifikan
JKA	1,543	,124	Tidak Signifikan
JRKA	2,083	,038	Signifikan
PKI	2,203	,029	Signifikan
JRDK	1,045	,297	Tidak Signifikan
CR	2,929	,004	Signifikan
ROE	,344	,731	Tidak Signifikan
LEV	,306	,760	Tidak Signifikan

Sumber : Data primer, diolah 2014

### **Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dengan nilai t hitung sebesar -0,336 dan nilai signifikansi 0,737 yang lebih besar dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel latar belakang pendidikan komisaris utama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS dengan arah negatif. Latar belakang pendidikan komisaris utama ditentukan dari pendidikan ekonomi dan bisnis.

Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis tidak menunjang kelangsungan bisnis perusahaan akan tetapi jenis usaha perusahaanlah yang lebih diperlukan untuk menunjang kelangsungan bisnis perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Permatasari (2010) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak mempengaruhi *environmental disclosure*. Hasil penelitian Prawinandi *et al.* (2012) juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharis (2012) bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

### **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Wanita terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa proporsi komisaris wanita berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dengan nilai hitung t sebesar -2,719 dan nilai signifikansi 0,007 yang lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris wanita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dengan arah negatif. Hal ini berarti jika variabel proporsi komisaris wanita ditingkatkan maka akan mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sebesar 0,007 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan atau tidak berubah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Prawinandi *et al.*(2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dengan nilai hitung  $t$  sebesar 3,138 dan nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hal ini menunjukkan bahwa komisaris yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan monitoring sehingga akan mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan (Beasley, 1996).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel kepemilikan institusional dihasilkan nilai  $t$  hitung sebesar 2,604 dengan nilai signifikansi 0,010 yang lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis sehingga hipotesis keempat diterima.

Diperoleh hasil bahwa tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Eng dan Mak, 2003), maka dari itu kepemilikan institusional yang lebih besar akan meningkatkan kepatuhan wajib IFRS. Hal tersebut karena adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standarnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi *et al.* (2012) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Nabor (2014) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

### **Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel jumlah komite audit (JKA) dihasilkan nilai  $t$  hitung sebesar 1,543 dengan nilai signifikansi 0,124 yang lebih besar dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hal ini dikarenakan keberadaan anggota komite audit yang tidak dapat berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut bisa dikarenakan dalam pengambilan keputusan penunjukkan komite audit tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anggota komite audit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2014) yang menjelaskan bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Namun penelitian ini sejalan dengan

penelitian Prawinandi *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

### **Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel jumlah rapat komite audit (JRKA) dihasilkan nilai t hitung sebesar 2,083 dengan nilai signifikansi 0,038 yang lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan rapat komite audit yang lebih banyak dalam setahun cenderung melakukan pengungkapan wajib yang lebih banyak, serta terdapat kemungkinan bahwa rapat tersebut dapat terkoordinasi dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendapatkan proses pelaporan yang terungkap dan transparan terhadap komite audit.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al.* (2014) yang menjelaskan bahwa rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Suhardjanto *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa variabel jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *risk disclosure*.

### **Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel proporsi komisaris independen (PKI) dihasilkan nilai t hitung sebesar 2,203 dengan nilai signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan komisaris tersebut semakin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi *et al.* (2012) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian oleh Supriyono *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa variabel jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.

### **Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel jumlah rapat dewan komisaris (JRDK) dihasilkan nilai t hitung sebesar 1,045 dengan nilai signifikansi 0,297 yang lebih besar dari 0,050. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hal ini terjadi karena sering kali terdapat seseorang atau lebih komisaris yang mendominasi jalannya rapat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau

kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan, padahal proses rapat tersebut sangat penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris (Muntoro, 2006 dalam Utami *et al.*, 2012).

Hasil penelitian ini tidak didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Kharis (2012) bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Utami *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS.

### **Pengaruh Likuiditas terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Diketahui nilai t hitung CR adalah 2,929 dengan nilai signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat likuiditas suatu perusahaan semakin besar pula tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS tersebut.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Permata (2013) yang menunjukkan bahwa hasil likuiditas yang dihitung dengan *current ratio* berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fitri (2012) yang menyatakan bahwa Likuiditas (CR) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan tahunan.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Diketahui nilai t hitung ROE adalah 0,344 dengan nilai signifikansi 0,731 yang lebih besar dari 0,050. Karena adanya budaya yang berkembang di Indonesia yang menganggap bahwa praktik *corporate governance* adalah suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia (Mintara, 2008 dalam Prawinandi *et al.*, 2012).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Almila dan Retrinasari (2007) menyatakan bahwa variabel rasio *net profit margin* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Diketahui nilai t hitung LEV adalah 0,306 dengan nilai signifikansi 0,760 yang lebih besar dari 0,050. Dikarenakan jika memiliki *leverage* tinggi perusahaan akan lebih dimonitor oleh *stakeholders*, dimana sebagian perusahaan akan berusaha melakukan pengungkapan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* (Sejjaka, 2004) dan sebagian perusahaan yang lain berusaha untuk mengurangi pengungkapan informasi agar tidak menjadi sorotan *debtholders* (Suhardjanto dan Afni, 2009).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Almila dan Retrinasari (2007) menyatakan bahwa variabel rasio *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.



## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur dan mekanisme *corporate governance* pada tingkat *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh dari 84 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011 hingga 2013 sehingga total menjadi 252 *firm years*. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan statistik diskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan pengujian dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari pengolahan data statistik diskriptif data menunjukkan bahwa rerata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah sebesar 73,00%. Dimana rerata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* ini pada perusahaan manufaktur di Indonesia masih belum sesuai dengan peraturan yang disyaratkan, peraturan pengungkapan wajib tersebut telah diatur dan di sempurnakan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-431/BL/2012 Tanggal 01 Agustus 2012 yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan 100,000% laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah proporsi komisaris wanita, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen dan variabel kontrol yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah likuiditas. Variabel independen dan kontrol lainnya tidak berpengaruh.

### Saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan serta adanya kesimpulan yang dikemukakan oleh penelitian ini, maka akan dihasilkan saran bagi peneliti untuk dapat lebih baik lagi dalam penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur diharapkan penelitian berikutnya dapat menggunakan sampel perusahaan dengan sektor lain, agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan konvergensi IFRS secara merata di seluruh perusahaan *go public*.
2. Pada penelitian ini *checklist* yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang diambil dari Deloitte masih bersifat umum dan belum mengidentifikasi secara langsung item mana saja yang bersifat *mandatory* dan *voluntary*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi item-item yang digunakan dapat bersifat spesifik.
3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa item IFRS yang sudah dikonvergensi kedalam PSAK, penelitian selanjutnya disarankan dapat mengganti atau menambahkan jumlah item IFRS yang sudah dikonvergensi kedalam PSAK, seperti: PSAK 50 ( Instrumen keuangan: Penyajian ), PSAK 53 ( Pembayaran berbasis: Saham ), PSAK 56 ( Laba per saham ), dan lain sebagainya.
4. Diharapkan penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel lain yang bisa dijadikan tolak ukur penerapan tingkat kepatuhan konvergensi IFRS, misalnya: Dewan Direksi, Sekertaris Perusahaan, atau Kualitas Audit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adina, P., dan P. Ion. 2008. Aspects Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. *Annals Faculty of Economics Journal* 3 (1): 1407-1411.
- Akhtaruddin, M., M.A.A. Hossain, dan L. Yao. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *Journal of Applied Management Accounting Research* 7(1): 1-20.
- Allegrini, M., dan G. Greco. 2011. Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence From Italian Listed Companies. *Journal Management Government* 26: 208-209.
- Almilia.L. S, dan I. Retrinasari. 2007. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan Sustainability Reporting Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 3(1): 403-414.
- Armeda. C. Y. 2011. Analisis Perbedaan Tingkat Earnings Management pada Perusahaan Peserta (terdaftar) dan Non Peserta (tidak terdaftar) dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Keuangan Perbanas. Surabaya.
- Al-Akra, M., I. A., Eddie dan M. J. Ali. 2010. The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review* (42): 170-186.
- Al-Fayoumi, N., B. Abuzayed, dan D. Alexander. 2010. Ownership Structure and Earnings Management in Emerging Markets: The Case of Jordan. *International Research. Journal of Finance and Economics* (38): 28-47.
- Al-Mutawaa, A. dan A.M. Hewaidy. 2010. Disclosure Level and Compliance with IFRSs: An Empirical Investigation of Kuwaiti Companies. *The International Business and Economics Research Journal* 9(5): 33.
- Ashurov, Z. 2010. The Corporate Governance Mechanism: How It works in the Context of Uzbekistan. The 2nd International Scientific and Practical Conference on Innovation Processes and Corporate Governance, Minsk, Belarus. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1748444](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1748444). 15 November 2013 (17:07).
- Barako, D.G. 2007. Determinants of Voluntary Disclosure in Kenyan Companies Annual Reports. *African Journal of Business Management* 1(5): 113-128.
- Beasley, M. S., 1996. An Empirical Analysis of the Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* 71(4): 443-465
- Boediono, G.S.B. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Cety, T., dan D. Suhardjanto. 2010. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Enviromental Performance di Indonesia*. Call for paper. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Choi, Frederick D.S., Carol Ann Frost, Garry K Meek. 1999. *International Accounting. 3th edition. United Stated: Prentice Hall International*.
- Dahawy, K. 2009. Company Characteristics and Disclosure Level: The Case of Egypt. *International Research Journal of Finance and Economics* (34): 194-208.
- El-Gazzar, S.M., J.M. Fornaro., dan R.A. Jacob. 2006. *An Examination of The Determinants and Contents of Corporate Voluntary Disclosure of Management's Responsibilities for Financial Reporting*. Lubin School of Business Working Paper
- Eng, L. L., dan Y. T. Mak. 2003. Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy* (22): 325-345.
- Ettredge, M., K. Johnstone, M. Stone dan Q. Wang. 2010. The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. *Review of Accounting Studies, Forthcoming*: 1-34.

- Feijoo, B. F., S. Romero, dan S. Ruiz. 2012. Does Board Gender Composition Affect Corporate Social Responsibility Reporting? *Internasional Journal of Business and Social Science* 3(1): 31-38.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance. <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/articles.html>. 15 November 2013 (15:35).
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2006. *How is the Indonesian Corporate Governance Condition in Reality?*. <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/articles.html>. 15 November 2013 (14.21).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. 2010. *Basic Econometrics*. Eleventh Edition. New York: Mc. Graw-Hill.
- Herawaty, Vinola, 2008. Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable Dari Pengaruh Earning Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Hossain, M. 2008. The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. *European Journal of Scientific Research* 23(4): 659-680.
- Huafang, X., dan Y. Jianguo. 2007. Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence From Listed Companies in China. *Managerial Auditing Journal* 22(6): 604-619.
- Immanuela, Intan. 2009. Adopsi Penuh dan Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional. *Jurnal Ilmiah Widya Warta* 33(1): 69-75.
- Jensen, M.C., dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* (3): 305-360.
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor SE-02/PM/2004 Peraturan Nomor IX.1.5 Pembentukan komite dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Khan, Md. H. 2010. The Effect Of Corporate Governance Element On Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: Empirical Evidence From Private Commercial Banks Of Bangladesh. *International Journal of Law and Management* 52(2): 82-109.
- Kharis, A., dan D. Suhardjanto. 2012. Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib Pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal keuangan dan Perbankan* 16(1): 37-34.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) . 2006a. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta. [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf). 15 November 2013 (20:05).
- Kusumastuti, S., Supatmi, dan P. Sastra. 2007. Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Prespektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 88-98.
- Lins, K.V., dan F.E. Warnock. 2004. *Corporate Governance and the Shareholder Base*. International Finance Discussion Papers (816).
- Nalikka, A. 2009. Impact of Gender Diversity on Voluntary Disclosure in Annual Reports. *Journal of Accounting & Taxation* 1(1): 101-113.
- Nasution, M., dan D. Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 1-26.
- Natawidnyana, M.R. 2008. International Financial Reporting Standards (IFRS): a Brief Description. <http://natawidnyana.wordpress.com/2008/10/28/international-financial-reporting-standards-ifs-a-brief-description>. 15 Mei 2014 (19:45).
- Nurkhin, A. 2009. Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan

- yang tercatat di Bursa Efek Indonesia). *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*.
- Permatasari, N.D. 2009. Pengaruh Corporate Governance, Latar Belakang Pendidikan terhadap Environmental Disclosure. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Prawinandi, W., D. Suhardjanto, dan H. Triatmoko. 2012. Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September:1-22
- Sejjaaka, S. 2004. Corporate Mandatory Disclosure by financial Institutions in Uganda. *Journal of Accounting and Corporate Financial management in Emerging Markets Research in Accounting in Emerging Economies* (24): 123-148.
- Sekaran, U. 2000. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Keempat. Penerjemah: Kwan Men Yon. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Siallagan, H dan M. Machfoedz. 2006. "Mekanisme Corporate Governance Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. 23-26 Agustus 2006
- Siregar, V. S. dan S. Utama. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*:475-490
- Suhardjanto, D., dan A. N. Afni. 2009. Praktik Corporate Disclosure di Indonesia. Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 14(2): 125-139.
- \_\_\_\_\_ dan L. Miranti. 2009. Praktik Penerapan Indonesian Reporting Index dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)* 13(1): 63-77.
- \_\_\_\_\_, dan N. D. Permatasari. 2010. Pengaruh Corporate Governance, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Enviromental Disclosure: Studi Empiris pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 14(2): 151-164.
- \_\_\_\_\_, A. Dewi., E. Rahmawati., dan Firazona. 2012. Peran Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure Pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing* (9): 1-96.
- Sumiati, 2007. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Operasional Perusahaan melalui Kualitas Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Tesis*. Surabaya. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Syahrul, Y. 2002. *Bapepam: Kasus Kimia Farma Merupakan Tindak Pidana*. <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2002/11/04/brk.20021104-36,id.html>. 15 November 2013 (14:40).
- Tsalavoutas, I., I. Evans dan m. Smith. 2008. Compliance with IFRS Mandatory Disclosure Requirements: Exploring Methodological Issue. *Managerial Auditing Journal* 25(8): 814-842.
- Utami, W. D, D. Suhardjanto, dan S. Hartoko. 2012. Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September:1-22.
- Verrecchia, E. R dan D. Diamond. 1991. Disclosure, Liquidity and Cost of Equity Capital. *Journal of Finance*. 17(1): 3-40.

- Wardhani, R. 2008. *Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia Dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance*. Hibah Penelitian Falkutas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tanyawati. 2012. *Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. No. 2. Maret 2012*